

PERANAN KELOMPOK TANI DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

Donny Ivan Samuel Simatupang

Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Methodist Indonesia, Medan

ABSTRAKSI

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ketahanan pangan, peranan petani di pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan. Untuk saat ini, peran para petani sangat dibutuhkan guna meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia. Oleh karena itu, para petani sangat perlu suatu lembaga yang dapat membimbing para petani dalam meningkatkan produktivitas pangan, misalnya dengan mendirikan kelompok tani. Lembaga tersebut berfungsi untuk memberi penyuluhan kepada kelompok tani dan memberikan akses sarana tentang produksi pertanian.

Kata kunci : *kelompok tani dan ketahanan pangan*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ketahanan pangan mempunyai perspektif yang sangat mendasar karena akses terhadap pangan dan gizi seimbang bagi segenap rakyat merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. Keberhasilan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan pangan dan konsumsi gizi masyarakat. Ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional haruslah menjadi hal penting yang dapat mewarnai setiap kegiatan membangun bangsa ini (Nuhfil, 2005).

Pangan adalah kebutuhan yang paling mendasar dari suatu bangsa. Banyak contoh negara dengan sumber ekonomi cukup memadai tetapi mengalami kehancuran karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya. Sejarah juga menunjukkan bahwa strategi pangan banyak digunakan untuk menguasai pertahanan musuh. Dengan adanya ketergantungan pangan, suatu bangsa akan sulit lepas dari cengkraman penjajah/musuh. Dengan demikian upaya untuk mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional bukan hanya dipandang dari sisi untung rugi ekonomi saja tetapi harus disadari sebagai bagian yang mendasar bagi ketahanan nasional yang harus dilindungi (Saliem, dkk, 2001).

Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dengan angka pertumbuhan 1.7 % per tahun. Angka tersebut mengindikasikan besarnya bahan pangan yang harus tersedia. Kebutuhan yang besar jika tidak

Besar jika tidak diimbangi peningkatan produksi pangan justru menghadapi masalah bahaya latent yaitu laju peningkatan produksi di dalam negeri yang terus menurun. Sudah pasti jika tidak ada upaya untuk meningkatkan produksi pangan akan menimbulkan masalah antara kebutuhan dan ketersediaan dengan kesenjangan semakin melebar (Wahyudi, 2013).

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ketahanan pangan, peranan petani di pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan. Pentingnya pemberdayaan petani tersebut sangat beralasan karena kalau diperhatikan keberadaan lembaga pertanian akhir-akhir ini terutama sejak era otonomi daerah dilaksanakan ada kecenderungan perhatian pemerintah daerah terhadap kelembagaan petani sangat kurang bahkan terkesan diabaikan sehingga kelembagaan petani yang sebenarnya merupakan aset sangat berharga dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan belum berfungsi secara optimal seperti yang diharapkan.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peran kelompok tani dalam mendukung ketahanan pangan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Ketahanan Pangan

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya Conference of Food and Agriculture tahun 1943 yang mencanangkan konsep secure, adequate

and suitable supply of food for everyone". Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni "akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat". Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingärtner, 2000). Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan yang sering diacu :

1. Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996: kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
2. USAID (1992): kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif.
3. FAO (1997) : situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi :

1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu
2. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses
3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial
4. Berorientasi pada pemenuhan gizi
5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif

Di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, 23 vitamin dan mineral serta turunannya,

yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

- b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
- c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.

2.2. Sistem Ketahanan Pangan

Sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh. Salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik (Lasa, 2006). Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Sub sistem tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sub Sistem Ketersediaan

Yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksisendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

b. Akses Pangan

Yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup, agar kebutuhan gizinya dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian, ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan.

c. PenyerapanPangan

Yaitu penggunaanpanganuntukkebutuhanhidupsehat yang meliputikebutuhanenergidangizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari

penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita (Riel *et.al* , dalam Hanani, 2009).

Konsep ketahanan pangan yang sempit meninjau sistem ketahanan pangan dari aspek masukan yaitu produksi dan penyediaan pangan. Seperti banyak diketahui, baik secara nasional maupun global, ketersediaan pangan yang melimpah melebihi kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa seluruh penduduk terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Konsep ketahanan pangan yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sasaran pertama *Millenium Development Goals* (MDGs) bukanlah tercapainya produksi atau penyediaan pangan, tetapi menurunkan kemiskinan dan kelaparan sebagai 28 indikator kesejahteraan masyarakat. MDGs menggunakan pendekatan dampak bukan masukan.

3. Pembahasan

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ketahanan pangan, peranan kelompok petani di pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan karena petani inilah pada dasarnya pelaku utama pembangunan ketahanan pangan.

Keberadaan kelompok petani sangat penting diberdayakan karena potensinya sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Pertanian, pada tahun 2015 terdapat 37,75 juta lebih kepala keluarga (KK) yang bekerja di sektor pertanian. Dari jumlah tersebut, telah dibentuk kelembagaan kelompok tani sebanyak 374.736 kelompok. Kelembagaan kelompok tani ini sangat efektif sebagai sarana untuk kegiatan belajar, bekerja sama, dan pemupukan modal kelompok dalam mengembangkan usahatani.

Pentingnya pemberdayaan kelompok tani tersebut sangat beralasan karena kalau kita perhatikan keberadaan kelompok tani akhir-akhir ini. Kecenderungan perhatian pemerintah daerah terhadap kelembagaan kelompok tani sangat kurang bahkan terkesan diabaikan sehingga kelembagaan kelompok tani yang sebenarnya merupakan aset sangat berharga dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan belum berfungsi secara optimal seperti yang diharapkan.

Mengingat semakin kompleks dan besarnya tantangan pembangunan ketahanan pangan mendatang, terutama untuk mencapai kemandirian pangan, maka kelembagaan kelompok tani yang tersebar di seluruh pelosok pedesaan perlu dibenahi dan diberdayakan, sehingga mempunyai keberdayaan dalam melaksanakan usaha taninya.

Untuk mencapai keberdayaan tersebut, program pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan harus dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam hal (1) Memahami kekuatan (potensi) dan kelemahan kelompok; (2) Memperhitungkan peluang dan tantangan yang dihadapi, pada saat ini dan masa mendatang; (3) Memilih berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dan (4) Menyelenggarakan kehidupan berkelompok dan bermasyarakat yang serasi dengan lingkungannya secara berkesinambungan. Agar upaya memandirikan dan memberdayakan kelompok tani tersebut dapat dilaksanakan, setidaknya ada empat langkah strategis yang harus dilakukan, diantaranya :

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani. Upaya peningkatan SDM petani ini dapat dilakukan melalui proses pembelajaran melalui bimbingan penyuluhan, pelatihan, kursus, sekolah lapang, pendampingan dan lainnya. Materi dan cara penyampaiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan petani dan kemampuan petani sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi kelompok tani.
2. Kemudahan dalam akses sarana produksi pertanian. Mengingat sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, permodalan, alat dan mesin pertanian merupakan faktor (input) yang sangat menentukan hasil (output), maka keberpihakan pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang sarana produksi pertanian ini sangat diharapkan kelompok tani. Adanya slogan enam tepat (tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat) dalam penyaluran sarana produksi hendaknya tidak hanya manis di dalam kata-kata atau tulisan, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan, sehingga benar-benar dapat dirasakan kelompok tani.
3. Akses terhadap informasi. Dalam era informasi sekarang ini, pendapat yang mengatakan bahwa petani/ kelompok tani tidak memerlukan informasi adalah pendapat yang sangat keliru. Karena itu dalam masa mendatang berbagai informasi khususnya mengenai pembangunan ketahanan pangan

perlu disebarluaskan kepada petani, sehingga mereka dapat mengakses informasi/berita yang sedang dan akan terjadi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pertanian.

4. Keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian. Karena dari ketiga strategi yang diuraikan di atas sangat erat kaitannya dengan tugas aparat kelembagaan pemerintah di daerah sebagai fasilitator, motivator dan regulator, maka berbagai keberpihakan setiap pemimpin daerah terhadap pembangunan ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan dan berbagai program yang direncanakan dapat diimplementasikan di lapangan.

4. Penutup

Pangan merupakan hal yang sangat mendasar pada suatu bangsa. Suatu bangsa dapat dikatakan sejahtera apabila bangsa tersebut mampu memenuhi kebutuhan pangan pada negara tersebut. Kebutuhan pangan di negara Indonesia untuk saat ini belum dapat tercukupi, karena pertanian di negara ini belum bisa dikelola dengan baik. Untuk saat ini, peran para petani sangat dibutuhkan guna meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia. Oleh karena itu, para petani sangat perlu suatu lembaga yang dapat membimbing para petani dalam meningkatkan produktivitas pangan, misalnya dengan mendirikan kelompok tani. Lembaga tersebut berfungsi untuk memberi penyuluhan kepada kelompok tani dan memberikan akses sarana tentang produksi pertanian. Namun, biasanya hal tersebut tidak mudah diterima oleh para petani, maka dari itu kita sebagai penerus bangsa harus dapat meyakinkan para petani tentang bagaimana cara meningkatkan produktivitas pertanian guna ketahanan pangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Lasa, Y. 2006. Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005.

Maxwell, S., and T. Frankenberger. 1992. Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements: A technical review. Rome: International Fund for Agricultural Development/United Nations Children's Fund.

Nuhfil, A.R. 2005. *Ketersediaan dan Kemandirian Pangan*.

<http://nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/6ketersediaan-dan-kemandirian-pangan-6.pdf>. Diakses tanggal 7 Maret 2017.

Nuhfil Hanani AR. 2009. Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota. www.nuhfil.lecture.ub.ac.id/doc, diakses tanggal 24 Februari 2017 pukul 17.00 WIB.

Saliem, H.P., M.Ariani, Y. Marisa, T.B. Purwantini dan E.M.Lokollo. 2001. Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Rumah tangga dan Regional. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Departemen Pertanian. Bogor.

Wahyudi, 2013. Pengaruh Kualitas Aktiva terhadap Rentabilitas Bank Pundi Indonesia Periode 2005 – 2015. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Weingärtner, L. 2004. The Concept of Food and Nutrition Security. International Training Course Food and Nutrition Security Assessment Instruments and Intervention Strategies.